

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS LURAH MEMBINA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DIKELURAHAN UKUI KECAMATAN UKUI
KABUPATEN PELALAWAN STUDY RUKUN TETANGGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ROBIAN GUSNUR
157310114

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Robian Gusnur
 NPM : 157310114
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga
 Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan
 Ukui Kabupaten Pelalawan

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah

Pekanbaru, 24 Februari 2020

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut menyetujui,

Pembantu Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. H / Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	: Robian Gusnur
NPM	: 157310114
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

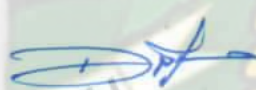
Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, 24 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Budi Mulianto, S.IP, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

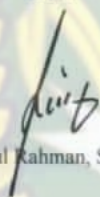
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Robian Gusnur
 NPM : 157310114
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga
 Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan
 Ukui Kabupaten Pelalawan

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 24 Februari 2020

Ketua



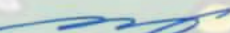
Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota



Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui,
 Pembantu Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Robian Gusnur
NPM : 157310114
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian :Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar usulan penelitian ini seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Bahwa, apabila kemudia hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Maret 2020

Pelaku Pernyataan

Robian

Gusnur

**Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga
Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui
Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga**

ABSTRAK

Robian Gusnur

157310114

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tugas Lurah

Penelitian ini bertujuan untuk Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga. Indikator dalam penelitian ini yaitu memberikan penyuluhan, memberi pengarah dan memberi bimbingan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan adalah tipe penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata, Penggunaan tipe penelitian ini mengukur secara cermat dengan menggunakan analisis penggabungan kuantitatif dan kuantitatif (mix methods) yakni pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif pada lokasi yang diteliti. Terhadap satu sekelompok objek yang lengkap dan jelas, sampel pada penelitian ini yaitu Rukun Tetangga Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Satu teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik random sampling berdasarkan tiap-tiap KK yang berbeda-beda.. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui alat penelitian berupa kusioner, wawancara, observasi, dokumentasi serta data skunder yang di kumpulkan dengan menggunakan alat bantu table frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga berada pada penilaian cukup baik.

**Implementation of the Task of the Lurah Fostering Social
Institutions in
Ukui Village, Ukui District, Pelalawan Regency**

ABSTRACT

Robian Gusnur

Keywords: Implementation, Task of the Lurah

The aim of this research is to carry out the task of the Head of the Village in Fostering Social Institutions in the Ukui Village, the Ukui District, the Pelalawan District Study of the Neighborhood Association. The indicators in this study are providing counseling, giving direction and providing guidance. This type of research is located in the Ukui Kelurahan Ukui Subdistrict Pelalawan District is a type of descriptive research, namely research that aims to explain or describe a situation, event, object whether a person, or everything related to variables that can be explained both with numbers as well as words, the use of this type of research measures carefully by using quantitative and quantitative merging analysis (mix methods) which is a research approach that combines qualitative research with quantitative research at the location under study. To one group of objects that are complete and clear, the sample in this study is the Rukun Tetangga Ukui Village, Ukui District, Pelalawan Regency. One sampling technique used in determining individual samples is a random sampling technique based on each different KK. Types and data collection techniques used consist of primary data which is collected through allat research in the form of questionnaires, interviews, observations, documentation and secondary data collected using the frequency table tool. Based on this analysis technique, the researchers assessed and concluded that the Implementation of the Task of the Lurah Fostering Social Institutions in the Ukui Village, the Ukui Subdistrict, the Pelalawan Regency, the Study of Neighboring Neighborhood was in a pretty good rating.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan berjuta kenikmatan dan anugrah yang tidak terhingga yang dengan nikmat-Nya itulah penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian dengan lancar tanpa ada halangan dan gangguan yang berarti.

Shalawat serta salam semoga selalu mengiringi jejak langkah dan perjuangan sang pemimpin dunia yang sanggup berperang dan memerangi kejahatan pikiran dan moral, sehingga beliau dipuja oleh sekalian pengikut-pengikut-Nya karena mampu membebaskan bangsa manusia dari jeruji kejahatan, insae kamil yang selalu memikirkan kepentingan umatnya dari pada kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya meskipun ajal sudah menjelang, beliau tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW.

Tidak lupa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan usulan penelitian, yakni

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M,C.L selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP, M.Si selaku ketua program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. H.Zaini Ali., M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah membantu mengarahkan dalam penulisan usulan penelitian ini.

5. Bapak Data Wardana,.S.Sos., M.IP selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan usulan penelitian dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff tata usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau.
7. Buat Ayah dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satuper satu.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada teman-teman seperjuangan.

Sehingga bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan jadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, Januari 2020

Penulis

Robian Gusnur

DAFTAR ISI

	Halam an
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIP	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	21
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Teori Pemerintahan.....	21
2. Teori Manajemen	24

3.	Teori Manajemen Pemerintahan	25
4.	Konsep Lembaga Masyarakat	26
5.	Konsep Pemerintahan Desa	36
6.	Teori Fungsi	37
7.	Konsep Kelurahan	38
8.	Teori Pembinaan	40
9.	Konsep Pelaksanaan Tugas	43
B.	Kerangka Pikiran.....	46
C.	Konsep Operasional	47
D.	Operasional Variabel.....	51
E.	Teknik Pengukuran	52
BAB III	METODE PENELITIAN	21
A.	Tipe Penelitian	55
B.	Lokasi Penelitian	55
C.	Populasi dan Sampel	56
D.	Teknik Pengambilan Sampel	56
E.	Jenis dan Sumber Data	58
F.	Teknik Pengumpulan Data	58
G.	Teknik Analisa Data	59
H.	Rencana Jadwal Waktu Penelitian.....	60
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	62
A.	Gambaran Umum Kecamatan Ukui.....	62

1. Sejarah Singkat Kecamatan Ukui	62
2. Sejarah Singkat Kelurahan Ukui.....	63
B. Keadaan Wilayah	64
1. Geografi.....	64
2. Keadaan Penduduk Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.....	65
3. Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	65
4. Sarana Pendidikan	67
5. Agama	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Identitas Responden	70
1. Identitas Responden berdasarkan pendidikan	70
2. Identitas Responden berdasarkan Usia.....	71
3. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin	72
B. Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga	73
1. Penyuluhan	73
2. Pengarahan	77
3. Bimbingan	81
C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Melakukan Pembinaan Terhadap Anggota Rt Dikelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.....	86
BAB VI PENUTUP	90
1. Kesimpulan	90
2. Saran	91
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	92
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

I.1	Nama dan jumlah lembaga kemasyarakatan di kelurahan ukui kecamatan ukui kabupaten pelalawan	9
I.2	Nama dan jumlah suku di kelurahan ukui kecamatan ukui kabupaten pelalawan	11
I.3	Bentuk pembinaan lurah terhadap lembaga kemasyarakatan di kelurahan ukui kecamatan ukui kabupaten pelalawan.....	12
II.1	Penelitian terdahulu	34
II.3	Operasional variabel penelitian evaluasi pelaksanaan tugas lurah dalam membina lembaga kemasyarakatan di kelurahan ukui kecamatan ukui kabupaten pelalawan	40
III.1	Populasi dan sampel	44
III.2	Jadwal penelitian.....	46

DAFTAR GAMBAR

- II.2 Evaluasi tugas lurah membina lembaga kemasyarakatan di
kelurahan ukui kecamatan ukui kabupaten pelalawan..... 36



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Robian Gusnur
NPM : 157310114
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar usulan penelitian ini seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

4. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
5. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Bahwa, apabila kemudia hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Maret 2020

Pelaku Pernyataan

Robian Gusnur

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimana Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesahterahan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkandaya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta

potensi dan keragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “ ketentuan ayat(1) diubah, sehingga pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) di bantu oleh wakilkepala daerah.
2. Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk daerah kota disebut wakil wali kota.

Dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan yang berlaku sekarang ini kelurahan adalah satuan pemerintahan yang paling rendah pada system pemerintahan di Indonesia. Kedudukan lurah pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 diatur pada pasal 25 ayat 1 yang mengatakan bahwa kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan diwilayah kelurahan dan pada ayat 2 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 dikatakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya lurah dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Selanjutnya pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 pada pasal 25 ayat 3 dikatakan tugas dari lurah meliputi:

- a) Pelaksanaan kegiatan kelurahan

- b) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- c) Pelaksanaan pelayanan masyarakat
- d) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat
- g) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sejalan dengan hal diatas, salah tugas yang diemban oleh Lurah adalah melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Hal ini dikarenakan Lembaga Kemasyarakatan merupakan pelaksana organisasi yang bersifat mewakili organisasi ke dalam dan luar, dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan bertanggung jawab kepada Musyawara Desa/Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan juga merupakan organisasi terendah dalam struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan sehingga dengan demikian pengurusnya dituntut memiliki pengetahuan keterampilan serta sikap yang positif terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat.

Kelurahan Ukui sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang berstatus desa administrasi di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Uraian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan. Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Kabupaten Pelalawan telah ditetapkan kedudukan, tugas dan fungsi

Lurah. Tugas-tugas tersebut yang terkandung pada pasal 5 (a dan b) adalah sebagai berikut:

- a) Kelurahan sebagai perangkat daerah memiliki wilayah kerja tertentu dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada bupati melalui camat.
- b) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sejumlah tugas tersebut, penulis ingin mendalami dan menilai tentang tugas lurah dalam melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan yaitu melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Adapun bentuk konkrit pembinnan Lurah kepada Lembaga Kemasyarkatan di kelurahan Ukui kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

- 1.Optimalisasi partisipasi Masyarakat Guna Mensukseskan Pembangunan,
- 2.Meningkatkan Kemampuan Anggota Linmas Guna Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan,
- 3.Meningkatkan Ketertiban Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan,
- 4.Melaksanakan Bintek Aparat Bidang Kemasyarakatan,

5. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan,

6. Mengoptimalkan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan

7. Meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

Pemerintah kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang terjadi kebutuhan warga masyarakat. Diharapkan dengan terciptanya pemerintah kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan sejahtera.

Untuk itu melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasaranaan dan fasilitas umum

6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Dari keterangan diatas dilihat bahwa salah satu yang menjadi tugas pemerintah kelurahan adalah “Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan” yang mana pembinaan istilah lembaga kemasyarakatan dalam bahasa inggris adalah social institution, namun social institution juga diterjemahkan sebagai pranata social. Lembaga Kemasyarakatan adalah jaringan proses hubungan antara manusia dan antara kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pada pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individual dan kelompoknya. Lembaga kemasyarakatan adalah tata cara kehidupan kelompok yang apabila dilanggar akan dijatuhi pelbagai derajat sanksi.

Soekanto dalam Raharjo (2004:162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat dalam Raharjo (2004:162) pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kapda aktifitas-aktifitas untuk memenuhi komplek-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Soekanto (1982;173) bahwa lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai fungsi:

- a) Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau sikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.

- b) Menjaga keutuhan masyarakat
- c) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial(social control) artinya system pengawasan terhadap tingkah laku.

Dengan adanya lembaga kemasyarakatan dimaksudkan untuk dapat memelihara dan melestarikan nilai gotong royong, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang sudah ada, yang mana tujuannya yaitu membimbing atau melatih lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan, seperti memberikan rukun tetangga dan rukun warga tentang Administrasi, sehingga tidak terjadi kesalahan, serta dapat meningkatkan potensi masyarakat agar lebih inovatif dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Didalam lembaga kemasyarakatan salah satu lembaga RT/RW ini yang mana pembinaan lembaga kemasyarakatannya khususnya yang terjadi salah satu focus peneliti. Pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dilakukan terhadap setiap lembaga yang ada di Kelurahan Ukui dan terdiri dari RT/RW,PKK,KARANG TARUNA hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari lembaga kemasyarakatan yang ada.

Dari sejumlah fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang lurah maka ini menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan lurah disamping tugas-tugas lain, yakni melaksanakan sejumlah tugas pokok yang dijelaskan pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dari sejumlah fungsi tersebut menjadi tanggung jawab seorang lurah maka ini menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan lurah disamping tugas-tugas lain, yakni melaksanakan sejumlah wewenang yang di limpahkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2005 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 4 ayat (2) yang mana fungsinya sebagai berikut :

- a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b) Penanaman dan pemukiman rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta;
- d) Pemanfaat, pelestariandan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e) Penumbuh kembangkan dan penggerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakatan;
- f) Penggali, pendayaguna dan pengembangan potensi sumber daya;
- g) Serta keserasian lingkungan hidup;

- h) Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenalan, penyalahgunaan obat terlarang (norkoba) bagi remaja;
- i) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- j) Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- k) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan BAB IV pasal 7. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) /Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 14, RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 15 dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan layanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Santoso (1995:52) Pentingnya Pembinaan dilakukan karena selain pemerintah memerlukan Lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung program pembangunan pemerintah baik dalam pembangunan fisik dan non fisik, juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada baik di desa atau kelurahan bukanlah lembaga yang betul-betul timbul dari masyarakat desa atau kelurahan tersebut. Karena itu perlu pembinaan sebagai usaha memelihara dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.

Pentingnya pembinaan yang dikemukakan oleh Santoso sudah jelas bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk membimbing atau melatih agar sasaran dalam pembinaan dalam hal ini lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan seperti RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain-lainnya bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat kelurahan. Ukui itu sendiri, sehingga nantinya menunjang akan pembangunan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat di kelurahan itu sendiri. Di

kelurahan Ukui terdapat lembaga kemasyarakatan yang mendapat perhatian untuk dibina, adapun lembaga tersebut yang terdapat di kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yaitu:

Tabel I.1. Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No	Nama Lembaga Kelurahan Ukui	Jumlah
1	PKK	1
2	LPM	1
3	Karang Taruna	1
4	Rukun Warga	11
5	Rukun Tetangga	29
	Jumlah	43

Sumber : Kantor Lurah Ukui

Dari Tabel I.1 diatas dapat dijelaskan bahwa organisasi masyarakat yang terdapat di Kelurahan Ukui yang terbanyak adalah lembaga Rukun Tetangga sebanyak 29 dan Rukun Warga sebanyak 11 keberadaan kelembagaan RT/RW ditengah-tengah masyarakat dianggap sangat penting kerana lembaga ini berperan sebagai lembaga sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Lembaga RT/RW dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintah untuk membawa pesan pembangunan dari pemerintah ke masyarakat.

Rukun Tetangga menurut pasal 11 butir 3 kepres Nomor 49 Tahun 2001 yaitu Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau disebut lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.

Menurut Rauf(2005:42) tujuan pembentukan Rukun Tetangga untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sedangkan menurut Rauf (2005:97) pengertian Rukun warga adalah rukun warga merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat setempat, dan bukan termasuk pemerintah, pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi mengakui lembaga rukun warga tersebut selanjutnya dibina oleh pemerintahan kota/kabupaten yang dalam hal ini adalah kelurahan.

Kemudian dijelaskan Rauf (2005:98) adapun maksud dan tujuan dibentuk RW adalah membantu pemerintah kota dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, serta menghimpun seluruh potensi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

Jika kita melihat fakta yang terjadi pada saat ini, keberadaan lembaga RT/RW sangat penting karena mengingat perannya yang begitu besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Masalah sosial yang terjadi saat ini seperti halnya tindakan kriminal yang sering terjadi. Seperti adanya warga masyarakat yang memproduksi narkoba,

berkembangnya paham radikalisme dan aliran sesat di tengah-tengah masyarakat serta isu-isu teroris, yang mana saat ini begitu meresahkan masyarakat, dan itu tidak terlepas dari peran lembaga RT dan RW yang lalai dalam mengawasi masyarakat sekitarnya.

Kecamatan Ukui merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya merupakan sebuah desa yang dikenal dengan Desa Ukui Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar. Kecamatan Ukui dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti. Pada tanggal 24 April 2001 Desa Ukui Satu diresmikan oleh Bupati Pelalawan menjadi Kecamatan Ukui.

Kondisi masyarakat Kecamatan Ukui sangat heterogen yang hampir seluruh suku bangsa yang ada di Negara Republik Indonesia ini berada di Kelurahan Ukui ini, dengan beranekaragam pemeluk agama, suku, budaya dan adat istiadat.

Kecamatan Ukui mempunyai luas wilayah 1.494.75 Km² jika dipresentasikan ± 95 % merupakan wilayah dataran rendah dengan yang terdiri 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan dengan Jumlah Penduduk ± 30.190 Jiwa.

- a. Batas Wilayah Kecamatan
 - ☞ Sebelah Utara Berbatas dengan Kecamatan Pangkalan Lesung
 - ☞ Sebelah Selatan Berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
 - ☞ Sebelah Barat Berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu
 - ☞ Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pangkalan Lesung
- b. Jumlah Desa : 11 desa
- c. Jumlah Kelurahan : 1 kelurahan
- d. Kepadatan Penduduk : ± 28,6 Jiwa / Km²
- e. Iklim : Tropis

Kecamatan Ukui terletak di Jalur Khatulistiwa dengan Iklim panas dengan suhu rata-rata 28 s/d 35⁰ C dengan ketinggian dari permukaan laut 10-15 mil serta curah hujan 5.583,5 mm / Tahun.

Kelurahan Ukui merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yang mana pembanguna baik pembangunan fisik maupun non fisik terus berkembang dan berjalan baik. Kelurahan ini mempunyai luas wilayah 1.895 km dengan jumlah penduduk laki-laki 2.704 orang, Perempuan 2.651 orang jumlah keseluruhan 5.355 orang dan semuanya Warga Negara Indonesia (WNI).

Kelurahan Ukui mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pangkalan Lesung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Gajah dan Air Emas
- Sebelah Timur berbatasan dengan Genduang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ukui Dua

Tabel I.2 Nama Dan Jumlah Suku Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten

Pelalawan

No	Suku di Kelurahan Ukui	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1	2	3	4
1	Aceh	25	22
2	Batak	380	359
3	Nias	56	49
4	Melayu	1.463	1.430
5	Minang	230	221
6	Jawa	30	32
7	Sunda	20	18
8	Madura	19	21
	Jumlah Keseluruhan	2.223	2.152

Sumber : Kantor Lurah Ukui Tahun 2017

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di kelurahan ukui adalah dikarenakan di kelurahan ukui terdapat berbagai macam suku masyarakat yang berbeda-beda yang tinggal disana hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih kelurahan ukui sebagai objek penelitian di karenakan masyarakat di kelurahan ukui lebih beragam di bandingkan dengan masyarakat yang ada pada desa yang lain di kecamatan ukui.

Selain melakukan kerja sama dengan membangun kegiatan masyarakat kelurahan Ukui, kegiatan lurah yang lain adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagai salah satu tugas lurah dalam melaksanakan tugas pemerintahan karena bila pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan berhasil, maka tugas pemerintahan kelurahan semakin ringan kerana dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang ikut bersama pemerintah kelurahan menjalankan kegiatan pembangunan.

Selain itu, sesuai dengan tugas lurah yang dijelaskan sebelumnya fungsi lurah diantaranya melakukan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, dari data yang penulis dapatkan di Kelurahan Ukui juga memiliki program pembinaan RT/RW oleh lurah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Program Pembinaan RT dan RW di Kelurahan Ukui

No	Hari/ Tanggal	Agenda Pertemuan	Lokasi
1.	Selasa 29 Januari 2019	Rapat Musren Kelurahan	Aula Kantor Lurah Ukui
2.	Senin 11 Maret 2019	Reses Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan	RT.15 RW.006 Dusun Ampel Gading

3.	Selasa 09 April 2019	Rapat Bulanan	Aula Kantor Lurah Ukui
4.	Selasa 30 April 2019	Silatuhrahmi	Kantor Lurah Ukui
5.	Rabu 19 Juni 2019	Rapat Rutin Kelurahan dan Persiapan PKK Kelurahan	Kantor Lurah Ukui
6.	Selasa 09 Juli 2019	Rapat Rutin Bulanan mengenai keamanan dan kebersihan di kelurahan ukui	Kantor Lurah Ukui
7.	Kamis 01 Agustus 2019	Rapat Gotong Royong Kelurahan Menyambut HUT RI KE-74	Kantor Lurah Ukui

Sumber : Kantor Kelurahan Ukui, 2019

Dari tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lurah Ukui kepada RT/RW masih bersifat umum yaitu hanya pertemuan rutin lurah dan perangkatnya dengan RT/RW . Pada pertemuan bulanan tanggal 09 juli 2019 dalam agenda rapatnya membahas masalah kegiatan pos kamling yang akan diadakan secara bergilir ditiap RT akan tetapi sampai saat ini agenda yang sudah dirapatkan tersebut belum juga terealisasikan dilapangan yang mana belum diadakannya ronda bergilir yang dilakkan oleh masyarakat dan pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 01 agustus 2019 salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah masalah kebersihan lingkungan dikelurahan ukui dan dalam pertemuan tersebut telah ditetapkan kegiatan gotong royong yang diadakan setiap bulannya akan tetapi pada kenyataan dilapangan belum juga bisa terealisasikan dengan baik yang mana ada juga sebagian masyarakat yang tidak mau bergotong royong disekitar area pasar ukui dengan alasan area pasar sudah ada yang bertugas membersihkan pasar. Dan karena belum berjalannya kegiatan yang sudah direncanakantkan dan juga belum efisiennya sosialisasi yang di berikat RT

kepada masyarakat maka sering terjadi kejahatan-kejahatan sosial dan pelanggaran ketertiban umum, dan juga masih banyaknya warga membuang sampah sembarangan. Dari pertemuan rutin tiap bulan ini masih terdapat juga RT/RW yang tidak dapat hadir(bisa dilihat pada dokumentasi pada hal 98). Hal ini menunjukkan bahwa kurang dinamisnya kegiatan lembaga RT/RW yang ada di Kelurahan Ukui. Bila kita kaji lebih mendalam, lurah merupakan sebagai pejabat yang diberi otoritas untuk melakukan tugas-tugas pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai sumber daya guna mempercepat tercapainya masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.

Lurah melakukan berbagai pembinaan terhadap Rukun tetangga sebagaimana data tabel berikut :

Tabel I.4.Bentuk Pembinaan Lurah Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No	Pembinaan Kelurahan	Bentuk Pembinaan Kelurahan	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Penyuluhan Keamanan Lingkungan dan Kebersihan	Pemberian pengarahan kepada RT/RW tentang keamanan lingkungan di kelurahan ukui		Tidak terlaksana
1	2	3	4	5
2.	Pembinaan Administrasi	Memberikan pengarahan kepada rukun tetangga dalam administerasi surat pengantar	Terlaksana	
3.	Pengarahan Keamanan	Memberikan pengarahan kepada		Tidak terlaksana

		RT/RW tentang pelaksanaan ronda bergilir yang dilakukan diwilayah RT/RW masing-masing		
--	--	---	--	--

Sumber : Kantor Lurah Ukui

Dari tabel I.4 terlihat sejumlah bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh lurah Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang dimana kegiatan bersifat umum yaitu pertemuan antar lurah dengan sejumlah lembaga kemasyarakatan seperti Rukun tetangga dalam mempersiapkan lembaga Rukun tetangga menangani masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Bentuk Penyuluhan yang telah terjadi dilapangan adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah yang dibuat untuk pembahasan suatu persoalan.

Pengarahan dalam pembinaan lurah yaitu memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Rukun tetangga supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Bimbingan lurah terhadap Rukun tetangga adalah pedoman dan motivasi agar lembaga RT/RW di kelurahan Ukui dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam data yang di peroleh penulis dapat menyimpulkan sejumlah fenomena-fenomena yang terjadi di kelurahan ukui kecamatan ukui antara lain :

1. Tidak berjalannya siskamling di kelurahan ukui yang disebabkan Lurah ukui belum bisa membina dengan baik para anggota RT supaya bisa mengajak

masyarakat mau bersama-sama melakukan ronda bergilir untuk menjaga ketentraman dilingkuangan masing-masing.

2. Belum bisanya lurah ukui dalam melakukan pembinaan kepada anggota RT tentang menjaga kebersihan lingkungan dimasyarakat yang mana masih ditemukan banyak masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan.

Berangkat dari fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “ **Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga** “

B.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan diatas pada maka penulis memutuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “**Bagaimana hasil Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Di kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan**”.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

- a. Untntuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ukui Kecamatan ukui Kabupaten Pelalawan.

b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Lurahn Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

b. Kegunaan Penelitian

- a. Guna teoritis, yaitu penelitian dapat dijadikan sebagai bahan studi ataupun pembelajaran untuk perkembangan Ilmu Pemerintahan.
- b. Guna Akademis, yaitu penelitian dapat menjadikan bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti ,peneliti berikutnya sesuai dengan bidang ilmu kajian yang terkait.
- c. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti peneliti lainnya yang berminat untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang berbagai hal yang berhubungan dengan peneliti.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PENELITIAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Teori Pemerintahan

Syafiie (2001 : 23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), Pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dan pemerintahnya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2010 : 4) dari beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutkan “ Government” dan Prancis menyebutkan “Government” . Dalam bahasa Arab “Hukumat” di Amerika Serikat disebut “Administration”, sedangkan Belanda mengartikan “Regering” sebagai penggunaan kekuasaan Negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara dan sebagai penguasa menetapkan pemerintah. Ndraha (2003 :5) Pemerintahan adalah sebuah system multi

proses yang bertujuan memenuhi kebutuhan tuntutan yang pemerintah atas jasa publik dan layanan sipil, sedangkan pemerintah adalah yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintahan.

Ndraha (2003:7) Pemerintahan adalah orang-orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah.

Ndraha (2003:7) kemudian yang disebut pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia wajib melayankannya.

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi Pelayanan

Menurut Ndraha (2003:7) lebih lanjut bahwa yang dikatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Negara Indonesian merupakan negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu dalam melaksanakan roda pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh daerah sehingga masalah-masalah pemerintah tidak hanya terbebaskan oleh pemerintahan pusat saja.

Menurut Muhammad Hatta (2010:39) pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat menentukan nasibnya tidak hanya pada pucuk pimpinan negeri, tetapi juga pada setiap tempat dikota, desa dan daerah. Dalam Rosidin.

2. Teori Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kunomenagement yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Kata Manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) maneggiare yang berarti “mengendalikan”, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin manus yang berarti “tangan”. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi management yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

Manajemen adalah suatu seni didalam sebuah proses dan ilmu pengorganisasikan. Yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara bekerja dalam team. Manajemen merupakan sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan. Dalam penerapannya manajemen memilikisubjek dan objek, subjek adalah orang yang mengatur sedangkan objek adalah yang diatur. Jadi Pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kepemimpinan, pengadilan dan

pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diterapkan,

Fungsi Manajemen

- Perencanaan (planning)
- Pengorganisasikan (organizing)
- Pengarahan (directing)
- Pengendalian (controlling)

Tujuan Manajemen

- Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien
- Mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategis
- Senantiasa memperbaharui strategis yang kita rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman peluang yang ada.
- Senantiasa melakukan inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup kita lebih teratur.
- Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

Menurut Manulang Manajemen adalah seni dan ilmu, pencatatan, pengorganisasikan, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.

Menurut Luther Gulick Manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang berupaya secara sistematis bertujuan untuk memahami bagaimana serta mengapa manusia bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Menurut Joseph Massie Manajemen adalah proses dimana kelompok yang saling bekerja sama mengarahkan tindakannya ke arah tujuan bersama.

Menurut Karnadi Wargasmita Manajemen merupakan mengatur, mengurus, memimpin, dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan ke arah tujuan usaha.

Menurut Wilson Bangun Manajemen adalah serangkaian berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh tiap anggota organisasi untuk meraih tujuan organisasi tersebut.

3. Teori Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan disebut manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan saran dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sector swasta maupun dalam sector publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sector publik yang diangkat dari manajemen sector swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sector publik menjadi sama dengan sector swasta.

Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa :

“Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”. (Istianto, 2011: 29) Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (*“doing right things”*) secara efficient (*“doing things*

right”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” (Ndraha, 2011: 159).

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybermology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160), antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut .

4. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Soekanto dalam Raharjo (2004:162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat dalam Raharjo (2004:162) pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kapda aktifitas-aktifitas untuk memenuhi komplek-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakatan.

Raharjo (2004:162) Dari tiga definisi diatas jelas tersirat suatu pengertian bahwa lembaga itu adalah suatu system atau kompleks nilai dan norma. System nilai dan

norma atau tata kelakuan ini berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu sehingga kompleks nilai dan norma yang ada pada berbagai lembaga menjadi berbeda pula seiring dengan perbedaab kepentingan yang akan dicapai lewat lembaga-lembaga tersebut.

Selanjutnya Soekanto (2002:197) menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan ini *social-institution* tersebut. Ada yang menggunakan istilah “pranata sosial” tetapi *social-institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas untuk memenuhi kompleks-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Defenisi tersebut menekankan pada system tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain yang diusulkan adalah “bangunan sosial” yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah *Soziale-Gebilde* (bahasa jerman) yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan *social-institution* tersbut.

Adapun ciri-ciri umum menurut Gilin dalam Soekanto (2002:209) didalam karyanya yang berjudul *General Features of Social Instituon* adalah sebagai berikut:

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya,

tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung mampu tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional

2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupeken ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. System-system kepercayaan ada aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyaraktan setelah melewati waktu yang relative lama. Misalnya suatu system pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaab. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan perbedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya fungsi social lembaga tersebut yaitu peranan lembaga tadi dalam system social dan kebudayaan masyarakat, mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpamanya lembaga perbudakan, ternyata tujuan tersebut untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya. Tetapi di dalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.

4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang di gunakan untuk mencapai tujuan lembaga kemasyarakatan seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antar satu dengan masyarakat ini. Misalnya gergaji jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila didorong.
5. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji: perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institute dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lembaga tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Lebih lanjut Gillin dalam Soekanto (2002: 211-212) mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:

Di dalam pasal 1 poin (6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 12 diuraikan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
2. Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. Penuh perkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup
7. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja
8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, dan
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai Lembaga Kemasyarakatan ini, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman Penataan Lembaga Kemasyaraktan pasal 1 poin (1) menjelaskan lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Adapun jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan pada pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau disebut nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penegak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna dan;
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau disebut

nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau disebut nama lain mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta;
- d. Pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhan kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali,pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan Kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;

- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat-istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa dan Lurah.

Lembaga adat-istiadat mempunyai fungsi:

- a. Penampung dan penyaluran pendapat aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memperdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah RT/RW mempunyai fungsi:

- a. Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
- b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam melaksanakan pembangunan dengan pengembangan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkeimbangan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;

- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan Kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya;
- h. Penyelenggararujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sector lainnya;
- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang actual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

5. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja (2014:3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan dapat menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Widjaja (2014:4) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Widjaja (2014:165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut Arbi Sani dalam Rauf dan Zulfan (2004 : 35), bahwa fungsi BPD yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislatif atau badan pembuat undang-undang kepadanya, melalui fungsi parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal yang sah. Dan pada waktu yang bersamaan, parlemen

juga berperan pula sebagai unsur pemerintahan atau memberi dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintahan selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang terkandung pada pasal-pasal didalam perundang-undangan.

Sedangkan keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Yang dimaksud wakil masyarakat dalam hal ini seperti kalangan adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh/pemuka masyarakat dari setiap dusun yang ada. Masa jabatan BPD adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

Maksud dan tujuan dibentuknya BPD adalah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam hal pengambilan dan pembuatan keputusan di tingkat desa. Sehingga demokrasi murni didesa tidak lagi dikotori oleh kepentingan-kepentingan lain (Rauf Zulfan,2004:14).

6. Teori Fungsi

Menurut Moerin (2010:24) fungsi merupakan rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktifitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesian merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Thoah (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dan suatu

instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

7. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kelurahan menjelaskan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam kabupaten/kota dalam kerja kecamatan, sedangkan lurah adalah kepala kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah merupakan perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi lurah adalah segala tindakan, kegiatan dan segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh lurah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yaitu dalam pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan fungsi lurah adalah:

- a) Pelakasanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Pelayanan masyarakat

- d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f) Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Kansil (2003:190) mengidentifikasi kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sutupo (2001:10) kebijakan public merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang diajukan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan public bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang atau golongan. Kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) kerana kebijakan merupakan aturan yang sudah di tetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang.

Inu Kencana Syafie (1999:105) Disamping itu kebijakan (*policy*) dapat juga kita katakana atau kita pergunakan untuk menuju perilaku seseorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) ataupun sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu.

Dunn (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkai aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan

gambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

8. Teori Pembinaan

Miflah Thoha (1997:8) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri biasa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu biasa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Santoso (1995:52) Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai menaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso (1995:60) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Menurut kamus besar bahasa Indonesian kata penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluhan adalah orang yang bertugas memberikan penerangan dan petunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh penyuluhan untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari

semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tau. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan lurah dalam membekali anggota/perangkat kelembagaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun indikatornya adalah:

- a. Membuat program penyuluhan
- b. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah yang dibuat Lurah untuk pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama.
- c. Melaksanakan program yang telah diatur
- d. Mengevaluasi program dari hasil tersebut

2. Pengarahan

Menurut Saure dan Dislainer dalam Wanadiana (2010) pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan lurah untuk memberi arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah:

- a. Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan
- b. Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintah desa

3. Bimbingan

Menurut Sunaryo Kartadinata (1998) bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan

secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan merupakan usaha-usaha yang dilakukan Lurah untuk mengajak, mengiring serta mendorong agar Lembaga Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT/RW diberikan secara tertulis
- b. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut
- c. Adanya diskusi atau Tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

Thoaha (2002:7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

Menurut Manullang (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intuksi kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Ndraha (1991:166) istilah pembinaan menunjukan antara lain : pengarahan, pengaturan dan pengisian. Sedangkan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 26 meliputi:

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan

- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- c. Menetapkan bantuan pembiayaan biaya alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
- d. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan

9. Konsep Pelaksanaan Tugas

Siagian (2005:126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Moekijat (1998:12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Defenisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut Jhon dan Mary Miner dalam moekjit (1998;10) menyatakan bahwa tugas ialah adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk tujuan khusus.

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai makna pelaksanaan tugas diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Menurut Moekijat (1998:11) Tugas adalah suatu bagian atau satu unsure atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsure (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

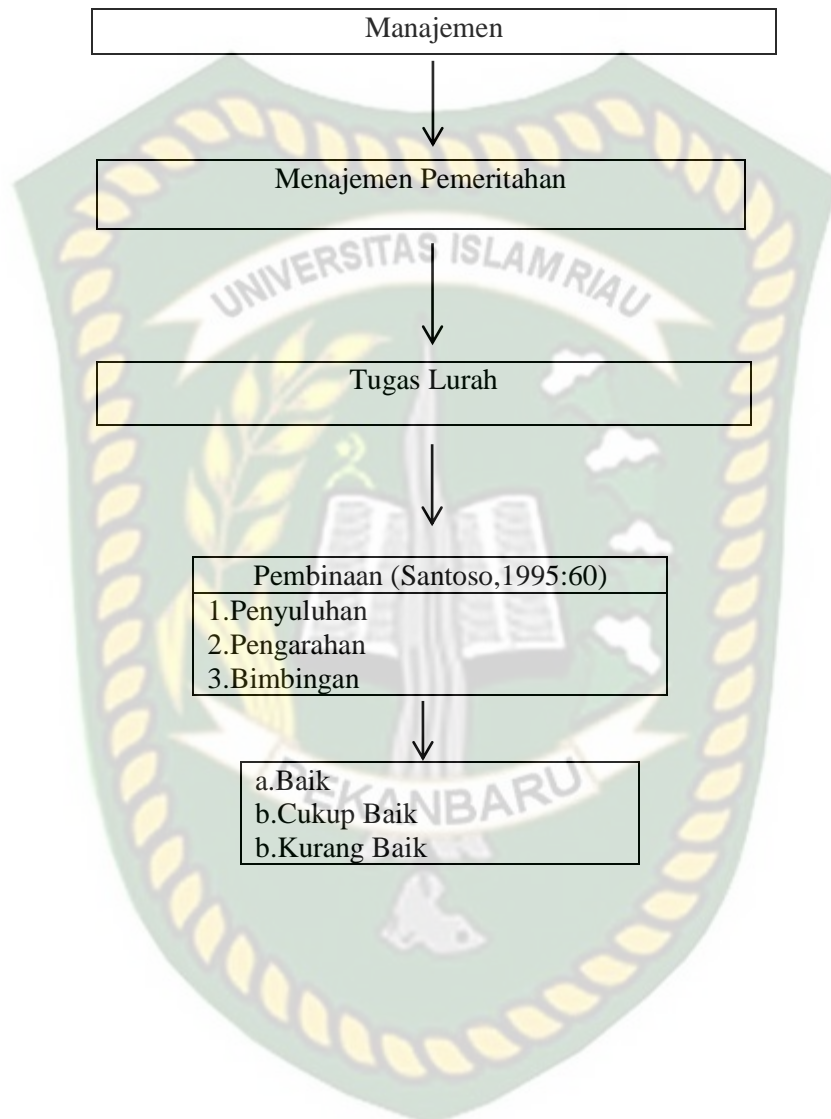
No	Nama	Judul	Tipe Penelitian	Analisis
1	Iga Megalana MPM : 127310340	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak	Tipe Survey Deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga dapat diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang menghadapi	Kuantitatif
2	Ine Antika MPM : 117310303	Evaluasi Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten	Tipe Deskriptif, Dimana penulis akan menggambarkan kondisi secara objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-	Kuantitatif

		Kampar	data yang berkaitan dengan permasalahan	
3	Wiwik Purwanti MPM : 147310164	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	Tipe Survey umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi.	Kuantitatif

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Adapun yang menjadi kerangka pikiran dalam penelitian ini mengenai :Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten pelalawan.

**Gambar II.2 :Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga
Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui
Kabupaten Pelalawan**



C. Konsep Operasional

Konsep operasional dari pada variable penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- 1.Manajemen adalah suatu seni didalam sebuah proses dan ilmu pengorganisasikan. Yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai

sebuah tujuan dengan cara bekerja dalam team. Manajemen merupakan sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan.

2. Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.

3. Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Tugas lurah sebagaimana didalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kelurahan yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan, dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

5. Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.

6. Pembinaan dalam penelitian ini menurut Santoso, (1995:60)

Pembinaan dapat dilakukan dalam dengan berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Kegiatan yang dilakukan lurah dalam membekali anggota/perangkat kelembagaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Adapun indikatornya adalah:

- Membuat program penyuluhan
- Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah yang dibuat lurah untuk pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama
- Melaksanakan program yang telah diatur
- Mengevaluasi program dari hasil tersebut

b. Pengarahan

Pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu atau perintah resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu.

Adapun indikatornya adalah:

- Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan
- Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintah desa
-

c. Bimbingan

Bimbingan merupakan usaha-usaha yang dilakukan lurah untuk mengajak, mengiring serta mendorong agar lembaga kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun indikatornya adalah:

- Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT/RW diberikan secara tertulis
- Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut
- Adanya diskusi atau Tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

7. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang yang melakukan pembinaan kepada yang dibina untuk meningkatkan lagi kemampuan orang yang dibina.

Pembinaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yakni:

a. Penyuluhan

dengan indikatornya adalah:

- a) Lurah haruslah membuat program tentang penyuluhan kepada RT.

- b) Didalam penyuluhan yang dilakukan lurah tersebut haruslah ada diskusi dan Tanya jawab antara lurah dengan RT tentang masalah yang sedang dibahas.
- c) Selanjutnya lurah harus membuat program dari hasil keputusan bersama tersebut bisa berjalan sebagaimana semestinya.
- d) Terakhir lurah harus mengadakan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan.

b. Pengarahan

dengan indikatornya adalah:

- a) Lurah dalam melakukan pengarahan haruslah melakukan pengarahan yang berhubungan dengan pemerintahan kepada anggota RT.
- b) Dalam saat melakukan pembinaan lurah harus mengumpulkan semua penyelenggara pemerintahan dikelurahannya untuk diberikan arahan.

c. Bimbingan

dengan indikatornya adalah:

- a) Lurah harus secara tertulis memberika kegiatan yang harus dikerjakan oleh anggota RT.
- b) Lurah haruslah mengusahakan apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh anggota RT.

- c) Lurah dalam melakukan bimbingan harus mengadakan sesi Tanya jawab dengan anggota RT perihal masalah yang tengah dibahas.

D. Operasional Variabel

Tabel II.3. Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Tugas Lurah

**Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan
Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Pembinaan adalah usaha memelihara ,melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi(Santoso(1995:52)	Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga	1. Penyuluhan	a.Membuat program penyuluhan b.Adanya peremuan,diskusi dan musyawarah yang dibuat lurah untuk membahas suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama c.Melakukan program yang telah diatur d.Mengevaluasi program dari hasil tersebut	a. Baik b. cukup baik c. Kurang baik
		2.Pengarahan	a. Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan b.Mengumpulkan setiap penyelenggaraan pemerintahan desa	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik

		3.Bimbingan	<p>a.Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis</p> <p>b.Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut</p> <p>c.Adanya diskusi atau Tanya jawab antara pembimbingan dan yang di bimbing</p>	<p>a. Baik</p> <p>b. Cukup baik</p> <p>C. Kurang Baik</p>
--	--	-------------	--	---

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Ukui maka dibuktikan pengukuran variable sebagai berikut:

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik pada rentang presentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-33%

Adapun Pengukuran indikator adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyuluhan terhadap rukun tetangga secara terarah, dikategorikan:

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik pada rentang presentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-33%

2. Memberikan pengarahan terhadap rukun tetangga, dikategorikan:

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik pada rentang presentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

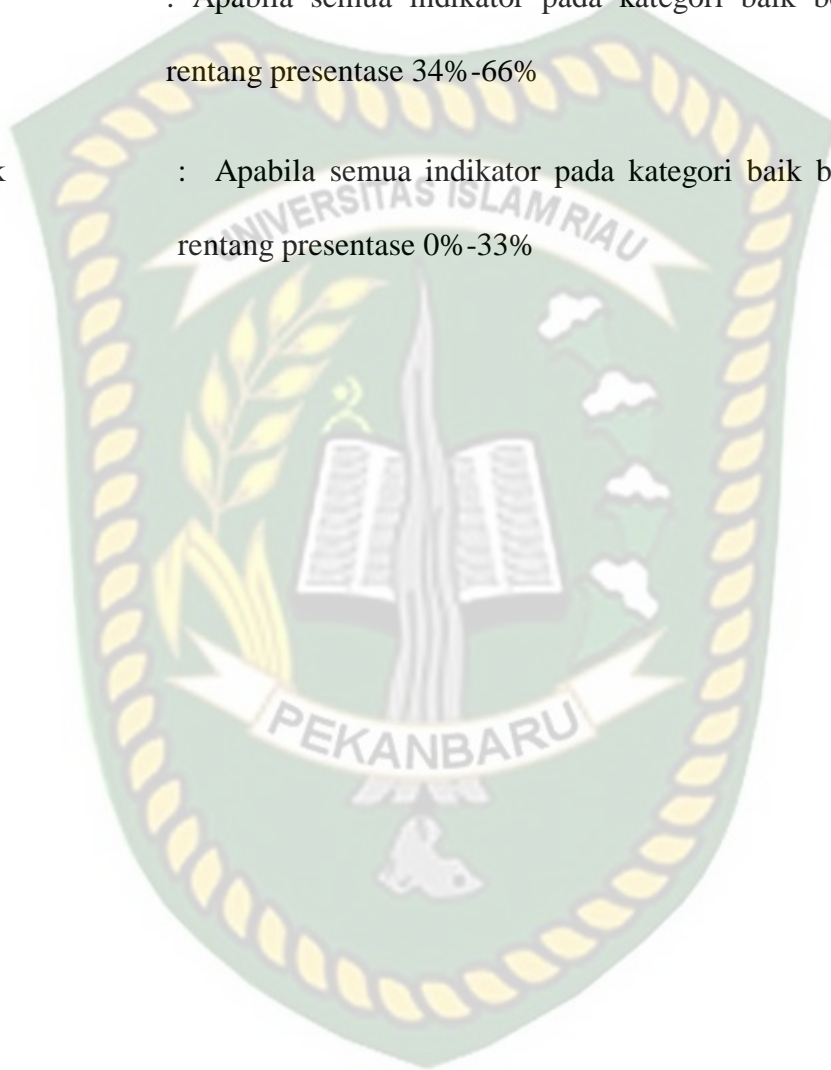
Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-34%

3. Memberikan Bimbingan Terhadap Rukun Tetangga, Dikategorikan:

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik pada rentang presentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-33%



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PENELITIAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Teori Pemerintahan

Syafiie (2001 : 23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), Pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dan pemerintahnya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2010 : 4) dari beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutkan “ Government” dan Prancis menyebutkan “Government” . Dalam bahasa Arab “Hukumat” di Amerika Serikat disebut “Administration”, sedangkan Belanda mengartikan “Regering” sebagai penggunaan kekuasaan Negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara dan sebagai penguasa menetapkan pemerintah. Ndraha (2003 :5) Pemerintahan adalah sebuah system multi proses yang bertujuan memenuhi kebutuhan tuntutan yang pemerintah atas jasa publik

dan layanan sipil, sedangkan pemerintah adalah yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintahan.

Ndraha (2003:7) Pemerintahan adalah orang-orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah.

Ndraha (2003:7) kemudian yang disebut pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia wajib melayankannya.

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi Pelayanan

Menurut Ndraha (2003:7) lebih lanjut bahwa yang dikatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan

undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu dalam melaksanakan roda pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh daerah sehingga masalah-masalah pemerintah tidak hanya terbebaskan oleh pemerintahan pusat saja.

Menurut Muhammad Hatta (2010:39) pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat menentukan nasibnya tidak hanya pada pucuk pimpinan negeri, tetapi juga pada setiap tempat dikota, desa dan daerah. Dalam Rosidin.

2. Teori Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis *managemen* yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Kata Manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) *maneggiare* yang berarti “mengendalikan”, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *management* yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

Manajemen adalah suatu seni didalam sebuah proses dan ilmu pengorganisasikan. Yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara bekerja dalam team. Manajemen merupakan sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan. Dalam penerapannya manajemen memiliki subjek dan objek, subjek adalah orang yang mengatur sedangkan objek adalah yang diatur. Jadi Pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kepemimpinan, pengadilan dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diterapkan,

Fungsi Manajemen

- Perencanaan (planning)

- Pengorganisasikan (organizing)
- Pengarahan (directing)
- Pengendalian (controlling)

Tujuan Manajemen

- Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien
- Mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategis
- Senantiasa memperbaharui strategis yang kita rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman peluang yang ada.
- Senantiasa melakukan inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup kita lebih teratur.
- Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

Menurut Manulang Manajemen adalah seni dan ilmu, pencatatan, pengorganisasikan, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.

Menurut Luther Gulick Manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang berupaya secara sistematis bertujuan untuk memahami bagaimana serta mengapa manusia bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Menurut Joseph Massie Manajemen adalah proses dimana kelompok yang saling bekerja sama mengarahkan tindakannya ke arah tujuan bersama.

Menurut Karnadi Wargasmita Manajemen merupakan mengatur, mengurus, memimpin, dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan ke arah tujuan usaha.

Menurut Wilson Bangun Manajemen adalah serangkaian berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh tiap anggota organisasi untuk meraih tujuan organisasi tersebut.

3. Teori Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan disebut manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan saran dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sector swasta maupun dalam sector publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sector publik yang diangkat dari manajemen sector swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasisector publik menjadi sama dengan sector swasta.

Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa :

“Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”. (Istianto, 2011: 29) Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“*doing right things*”) secara efficient (“*doing things right*”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” (Ndraha, 2011: 159).

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160), antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut .

4. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Soekanto dalam Raharjo (2004:162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat dalam Raharjo (2004:162) pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kapda aktifitas-aktifitas untuk memenuhi komplek-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakatan.

Raharjo (2004:162) Dari tiga definisi diatas jelas tersirat suatu pengertian bahwa lembaga itu adalah suatu system atau kompleks nilai dan norma. System nilai dan norma atau tata kelakuan ini berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu sehingga kompleks nilai dan norma yang ada pada berbagai lembaga menjadi berbeda pula seiring dengan perbedaab kepentingan yang akan dicapai lewat lembaga-lembaga tersebut.

Selanjutnya Soekanto (2002:197) menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan ini *social-institution* tersebut. Ada yang menggunakan istilah “pranata sosial” tetapi *social-institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas untuk memenuhi kompleks-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Defenisi tersebut menekankan pada system tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain yang diusulkan adalah “bangunan sosial” yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah *Soziale-Gebilde* (bahasa jerman) yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan *social-institution* tersebut.

Adapun ciri-ciri umum menurut Gilin dalam Soekanto (2002:209) didalam karyanya yang berjudul *General Features of Social Instituon* adalah sebagai berikut:

7. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung mampu tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional
8. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupeken ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. System-system kepercayaan ada aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyaraktan setelah melewati waktu

yang relative lama. Misalnya suatu system pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.

9. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan perbedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya fungsi social lembaga tersebut yaitu peranan lembaga tadi dalam system social dan kebudayaan masyarakat, mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpamanya lembaga perbudakan, ternyata tujuan tersebut untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya. Tetapi di dalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.
10. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang di pergunakan untuk mencapai tujuan lembaga kemasyarakatan seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antar satu dengan masyarakat ini. Misalnya gergaji jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan

memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila didorong.

11. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji: perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institute dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lembaga tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.
12. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Lebih lanjut Gillin dalam Soekanto (2002: 211-212) mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:

Di dalam pasal 1 poin (6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 12 di uraikan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:

11. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
12. Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
13. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
14. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
15. Penumbuhkembangan dan penggerak prakasa dan partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat
16. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup
17. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja
18. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
19. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, dan
20. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai Lembaga Kemasyarakatan ini, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman Penataan Lembaga Kemasyaraktan pasal 1 poin (1) menjelaskan lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Adapun jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan pada pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau disebut nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penegak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna dan;
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau disebut nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau disebut nama lain mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta;
- d. Pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhan kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali,pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan Kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, inforasi, sosialiasasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat-istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa dan Lurah.

Lembaga adat-istiadat mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran pendapat aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memperdayakan masyarakat dalam menunjang penyeengagaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintah RT/RW mempunyai fungsi:

- a. Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
- b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam melaksanakan pembangunan dengan pengembangan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkeimbangan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan Kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan

kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya;

- h. Penyelenggararujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sector lainnya;
- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang actual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

5. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja (2014:3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan dapat menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Widjaja (2014:4) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Widjaja (2014:165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut Arbi Sani dalam Rauf dan Zulfan (2004 : 35), bahwa fungsi BPD yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislatif atau badan pembuat undang-undang kepadanya, melalui fungsi parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal yang sah. Dan pada waktu yang bersamaan, parlemen juga berperan pula sebagai unsur pemerintahan atau memberi dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintahan selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang terkandung pada pasal-pasal didalam perundang-undangan.

Sedangkan keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Yang dimaksud wakil masyarakat dalam hal ini seperti kalangan adat, golongan propesi, pemuka agama, dan tokoh/pemuka masyarakat dari setiap dusun yang ada. Masa jabatan BPD adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

Maksud dan tujuan dibentuknya BPD adalah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam hal pengambilan dan pembuatan keputusan di tingkat desa. Sehingga demokrasi murni di desa tidak lagi dikotori oleh kepentingan-kepentingan lain (Rauf Zulfan,2004:14).

6. Teori Fungsi

Menurut Moerin (2010:24) fungsi merupakan rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktifitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Thoha (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dan suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

7. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kelurahan menjelaskan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam kabupaten/kota dalam kerja kecamatan, sedangkan lurah adalah kepala kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah merupakan perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi lurah adalah segala tindakan, kegiatan dan segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh lurah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yaitu dalam pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan fungsi lurah adalah:

- g) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- h) Pemberdayaan masyarakat
- i) Pelayanan masyarakat
- j) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- k) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- l) Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Kansil (2003:190) mengidentifikasi kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sutupo (2001:10) kebijakan public merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang diajukan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan public bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang atau golongan. Kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) kerana kebijakan merupakan aturan yang sudah di tetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang.

Inu Kencana Syafie (1999:105) Disamping itu kebijakan (*policy*) dapat juga kita katakana atau kita pergunakan untuk menuju perilaku seseorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) ataupun sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu.

Dunn (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkai aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan gambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

8. Teori Pembinaan

Miflah Thoha (1997:8) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri biasa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu biasa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Santoso (1995:52) Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai menaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso (1995:60) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Menurut kamus besar bahasa Indonesian kata penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluhan adalah orang yang bertugas memberikan penerangan dan petunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh penyuluhan untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tau. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan lurah dalam membekali anggota/perangkat

kelembagaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun indikatornya adalah:

- e. Membuat program penyuluhan
- f. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah yang dibuat Lurah untuk pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama.
- g. Melaksanakan program yang telah diatur
- h. Mengevaluasi program dari hasil tersebut

2. Pengarahan

Menurut Saure dan Dislainer dalam Wanadiana (2010) pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan lurah untuk memberi arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah:

- c. Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan
- d. Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintah desa

3. Bimbingan

Menurut Sunaryo Kartadinata (1998) bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan merupakan usaha-usaha yang dilakukan Lurah untuk mengajak, mengiringi serta

mendorong agar Lembaga Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT/RW diberikan secara tertulis
- b. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut
- c. Adanya diskusi atau Tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

Thoaha (2002:7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

Menurut Manullang (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intuksi kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Ndraha (1991:166) istilah pembinaan menunjukan antara lain : pengarahan, pengaturan dan pengisian. Sedangkan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 26 meliputi:

- h. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
- i. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

- j. Menetapkan bantuan pembiayaan biaya alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
- k. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
- m. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan

9. Konsep Pelaksanaan Tugas

Siagian (2005:126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Moekijat (1998:12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Defenisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut Jhon dan Mary Miner dalam moekjit (1998;10) menyatakan bahwa tugas lurah adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk tujuan khusus.

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai makna pelaksanaan tugas diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Menurut Moekijat (1998:11) Tugas adalah suatu bagian atau satu unsure atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsure (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tipe Penelitian	Analisis
1	Iga Megalana MPM : 127310340	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak	Tipe Survey Deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga dapat diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang menghadapi	Kuantitatif
2	Ine Antika MPM : 117310303	Evaluasi Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten	Tipe Deskriptif, Dimana penulis akan menggambarkan kondisi secara objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-	Kuantitatif

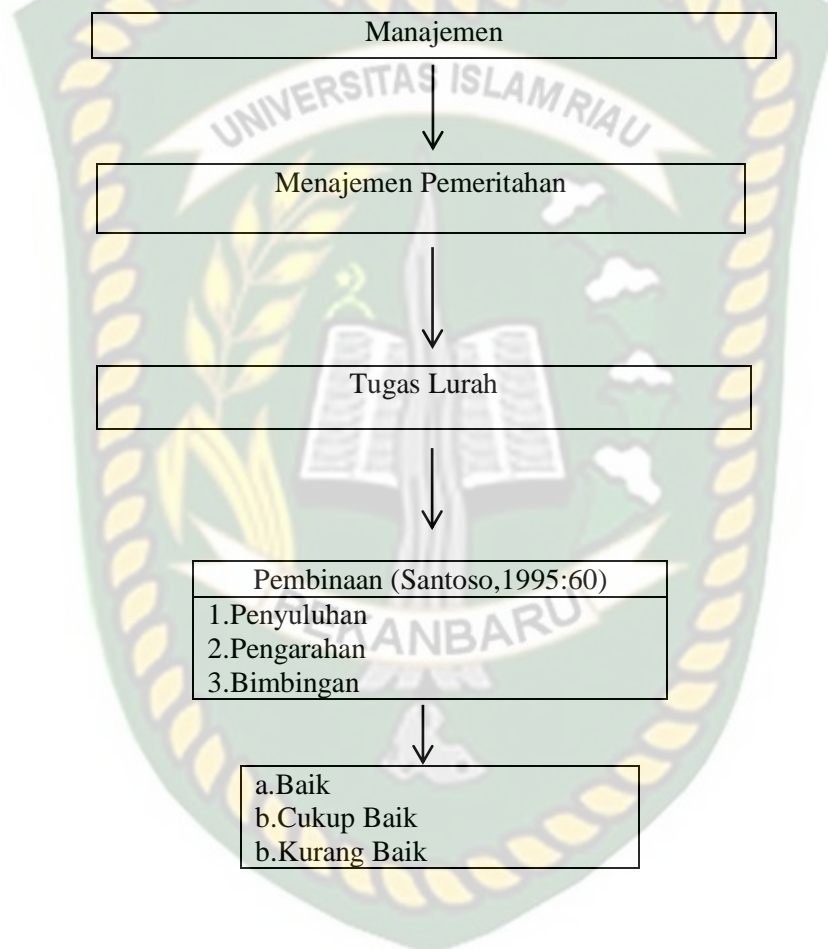
		Kampar	data yang berkaitan dengan permasalahan	
3	Wiwik Purwanti MPM : 147310164	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	Tipe Survey umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi.	Kuantitatif

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Adapun yang menjadi kerangka pikiran dalam

penelitian ini mengenai :Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten pelalawan.

Gambar II.2 :Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan



C. Konsep Operasional

Konsep operasional dari pada variable penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Manajemen adalah suatu seni didalam sebuah proses dan ilmu pengorganisasikan. Yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara bekerja dalam team. Manajemen merupakan sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan.
2. Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.
3. Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Tugas lurah sebagaimana didalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kelurahan yaitu:
 - g. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - h. Pemberdayaan masyarakat;
 - i. Pelayanan masyarakat;
 - j. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - k. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan, dan

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

5. Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.

6. Pembinaan dalam penelitian ini menurut Santoso, (1995:60)

Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

d. Penyuluhan

Kegiatan yang dilakukan lurah dalam membekali anggota/perangkat kelembagaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Adapun indikatornya adalah:

- Membuat program penyuluhan
- Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah yang dibuat lurah untuk pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama
- Melaksanakan program yang telah diatur
- Mengevaluasi program dari hasil tersebut

e. Pengarahan

Pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu atau perintah resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu.

Adapun indikatornya adalah:

- Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan
- Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintah desa

f. Bimbingan

Bimbingan merupakan usaha-usaha yang dilakukan lurah untuk mengajak, mengiringi serta mendorong agar lembaga kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun indikatornya adalah:

- Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT/RW diberikan secara tertulis
- Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut
- Adanya diskusi atau Tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

7. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang yang melakukan pembinaan kepada yang dibina untuk meningkatkan lagi kemampuan orang yang dibina.

Pembinaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yakni:

a. Penyuluhan

dengan indikatornya adalah:

- e) Lurah haruslah membuat program tentang penyuluhan kepada RT.
- f) Didalam penyuluhan yang dilakukan lurah tersebut haruslah ada diskusi dan Tanya jawab antara lurah dengan RT tentang masalah yang sedang dibahas.
- g) Selanjutnya lurah harus membuat program dari hasil keputusan bersama tersebut bisa berjalan sebagaimana semestinya.
- h) Terakhir lurah harus mengadakan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan.

b. Pengarahan

dengan indikatornya adalah:

- c) Lurah dalam melakukan pengarahan haruslah melakukan pengarahan yang berhubungan dengan pemerintahan kepada anggota RT.
- d) Dalam saat melakukan pembinaan lurah harus mengumpulkan semua penyelenggara pemerintahan dikelurahannya untuk diberikan arahan.

c. Bimbingan

dengan indikatornya adalah:

- d) Lurah harus secara tertulis memberika kegiatan yang harus dikerjakan oleh anggota RT.
- e) Lurah haruslah mengusahakan apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh anggota RT.

- f) Lurah dalam melakukan bimbingan harus mengadakan sesi Tanya jawab dengan anggota RT perihal masalah yang tengah dibahas.

D. Operasional Variabel

Tabel II.3. Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Tugas Lurah

**Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan
Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Pembinaan adalah usaha memelihara ,melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi(Santoso(1995:52)	Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga	1. Penyuluhan	a.Membuat program penyuluhan b.Adanya peremuan,diskusi dan musyawarah yang dibuat lurah untuk membahas suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama c.Melakukan program yang telah diatur d.Mengevaluasi program dari hasil tersebut	a. Baik b. cukup baik c. Kurang baik
		2.Pengarahan	a. Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan b.Mengumpulkan setiap penyelenggaraan pemerintahan desa	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik

		3.Bimbingan	<p>a.Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis</p> <p>b.Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut</p> <p>c.Adanya diskusi atau Tanya jawab antara pembimbingan dan yang di bimbing</p>	<p>a. Baik</p> <p>b. Cukup baik</p> <p>C. Kurang Baik</p>
--	--	-------------	--	---

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Ukui maka dibuktikan pengukuran variable sebagai berikut:

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik pada rentang presentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-33%

Adapun Pengukuran indikator adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyuluhan terhadap rukun tetangga secara terarah, dikategorikan:

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik pada rentang presentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-33%

2. Memberikan pengarahan terhadap rukun tetangga, dikategorikan:

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik pada rentang presentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

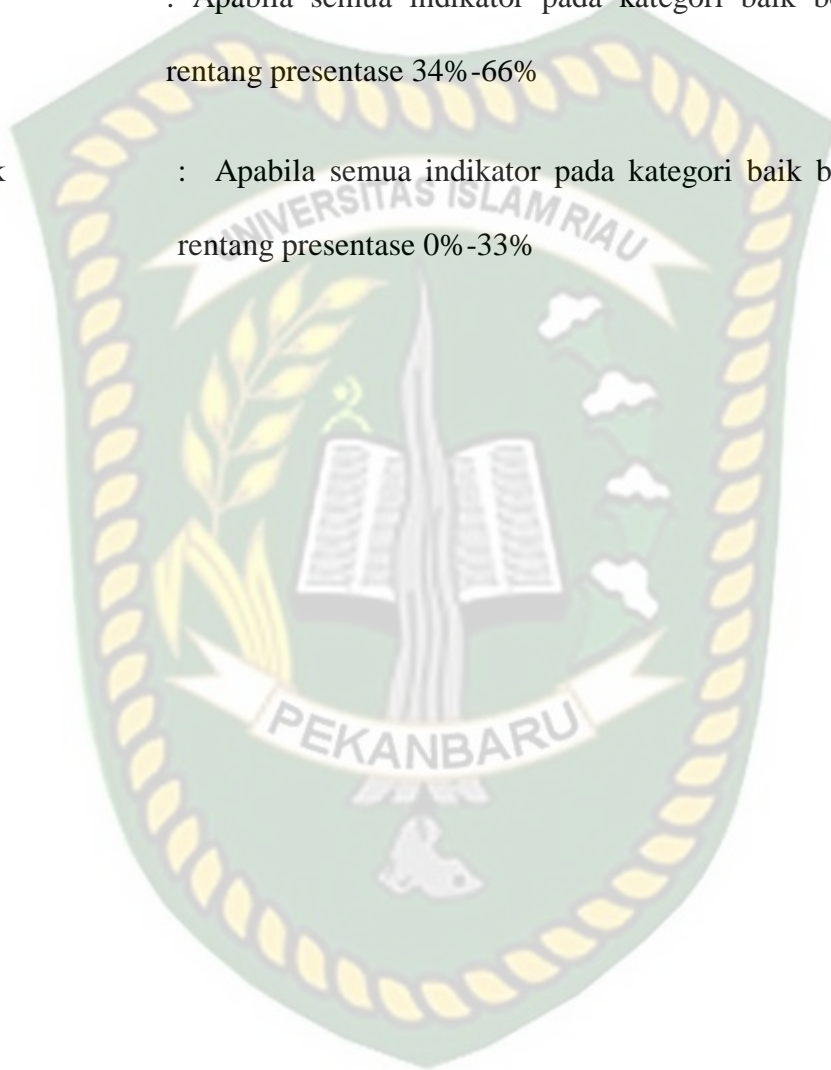
Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-34%

3. Memberikan Bimbingan Terhadap Rukun Tetangga, Dikategorikan:

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik pada rentang presentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-33%



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Ukui

1. Sejarah Singkat Kecamatan Ukui

Ukui adalah Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Riau Indonesia. Wilayah Kecamatan ini mencakup kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi kawasan konservasi/perlindungan alami Gajah dan Harimau. Nama “Ukui” diambil dari nama sungai yang melintas Desa Ukui II yaitu Batang Ukui. Penduduk asli adalah suku Melayu. Warga pendatang yang terutama masuk melalui program Transmigrasi terdiri atas orang Jawa, Batak, Minangkabau, serta beberapa suku lainnya.

Kecamatan Ukui merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya merupakan sebuah desa yang dikenal dengan Desa Ukui Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar. Kecamatan Ukui dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti. Pada tanggal 24 April 2001 Desa Ukui Satu diresmikan oleh Bupati Pelalawan menjadi Kecamatan Ukui.

Kondisi masyarakat Kecamatan Ukui sangat heterogen yang hampir seluruh suku bangsa yang ada di Negara Republik Indonesia ini berada di Kelurahan Ukui ini, dengan beranekaragam pemeluk agama, suku, budaya dan adat istiadat.

Kecamatan Ukui mempunyai luas wilayah 1.494.75 Km² jika dipresentasikan ± 95 % merupakan wilayah dataran rendah dengan yang terdiri 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan dengan Jumlah Penduduk ± 30.190 Jiwa.

- f. Batas Wilayah Kecamatan
- ☞ Sebelah Utara Berbatas dengan Kecamatan Pangkalan Lesung
 - ☞ Sebelah Selatan Berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
 - ☞ Sebelah Barat Berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu
 - ☞ Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pangkalan Lesung
- g. Jumlah Desa : 11 desa
- h. Jumlah Kelurahan : 1 kelurahan
- i. Kepadatan Penduduk : ± 28,6 Jiwa / Km²
- j. Iklim : Tropis

Kecamatan Ukui terletak di Jalur Khatulistiwa dengan iklim panas dengan suhu rata-rata 28 s/d 35⁰ C dengan ketinggian dari permukaan laut 10-15 mil serta curah hujan 5.583,5 mm / Tahun.

B. Sejarah Kelurahan Ukui

Sebelum Kelurahan Ukui dibentuk Ukui adalah sebuah desa yang ada di Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya juga termasuk kedalam wilayah Kabupaten

Kampar, sebelumnya juga termasuk Desa Ukui Satu merupakan suatu wilayah perbantuan yang ada dalam wilayah kekuasaan kerajaan Pelalawan yang disebut dengan wilayah perbantuan Tuo Napuh.

Kelurahan Ukui dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Pemekaran dan Perubahan status desa menjadi Kelurahan di Ibu Kota Kecamatan.

Pada tanggal 22 November 2005 Desa Ukui I di resmikan oleh Bupati Pelalawan menjadi Kelurahan Ukui.

Kondisi masyarakat Kelurahan Ukui sangat heterogen yang hamper seluruh suku bangsa yang ada di Negara Republik Indonesia ini berada di Kelurahan Ukui ini, dengan beranekaragam pemeluk agama, suku, budaya, dan adat istiadat.

C. Keadaan Wilayah

1. Geografis

Kelurahan Ukui mempunyai luas wilayah 1.895 Hektar Km² jika dipresentasikan \pm 95 % merupakan wilayah daratan rendah dengan mencakup 11 RW 29 RT dengan jumlah Penduduk 5.354 jiwa.

a. Batas Wilayah Kelurahan

- ☞ Sebelah Utara Berbatas dengan Kelurahan Pangkalan Lesung
- ☞ Sebelah Selatan Berbatas dengan Desa Genduang.
- ☞ Sebelah Barat Berbatas dengan Desa Bukit gajah dan Desa Air Emas

☞ Sebelah Timur berbatas dengan Desa Ukui II

- b. Jumlah RW : 11 RW
- c. Jumlah RT : 29 RT
- d. Kepadatan Penduduk : $\pm 28,6$ Jiwa / Km²
- e. Iklim : Tropis

Kelurahan Ukui terletak di Jalur Khatulistiwa dengan Iklim panas dengan suhu rata-rata 28 s/d 35⁰ C dengan ketinggian dari permukaan laut 10-15 mil serta curah hujan 5.583,5 mm / Tahun.

2. Keadaan Penduduk Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Penduduk Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sebahagian besar merupakan suku Melayu dan sebahagian kecil suku lain seperti suku Jawa, Minangkabau, dan Batak yang hidup bersama dengan penduduk setempat. Bahasa dan adat istiadat masyarakat Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Minang. Untuk mengetahui jumlah penduduk Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

Tabel IV 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Keluraha Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pepelawan.

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	2.703
2	Perempuan	2.651

Sumber: Data Kelurahan Ukui, 2018

3.Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui

Kabupaten Pelalawan

Manusia dalam mempertahankan hidup sangat membutuhkan makanan. Untuk memperoleh makanan tersebut manusia berjuang dengan cara bekerja, dalam suatu masyarakat akan selalu memiliki mata pencaharian yang sesuai dengan keadaan daerah tempat mereka tinggal. Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan penduduk rata-rata penduduk bekerja dibidang pertanian sekitar 317 orang, untuk mata pencaharian yang lain dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IV 2: Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencarian Dikelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	PNS	60
2	Honor	37
3	Dagang	119
4	Supir	17
5	Petani	317
6	Buruh	45
7	Buruh Harian Lepas (BHL)	67
8	Ibu Rumah Tangga (IRT)	1378
9	Pendeta	3
10	Pelajar	1091
11	Tidak Bekerja	1333
12	Karyawan Swasta	92

13	Wiraswasta	671
14	TNI	1
15	Polri	6
16	Mekanik	6
17	Imam Mesjid	6

Sumber: Data Kelurahan Ukui, 2018

4.Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan merupakan hal yang sangat penting demi kemajuan tingkat pendidikan disetiap daerah. Tersedia berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah atas baik negeri maupun swasta. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah semakin gencar membangun sarana dan prasarana pendidikan

khususnya di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sehingga kegiatan pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang handal di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IV 3: Jumlah Masyarakat Berdasarkan Sarana Pendidikan DiKelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

NO	Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Tidak Sekolah	1209
2	SD	1598

3	SMP	761
4	SMA	1029
5	DI	22
6	DII	6
7	DIII	62
8	DIV	24
9	S1	101
10	S2	2

Sumber: Data Kelurahan Ukui, 2018

4. Agama

Dilihat dari agama yang dianut sebagian besar masyarakat di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan beragama islam hanya sebagian kecil saja yang beraga katolik dan protestan. Kehidupan umat beragama dapat berdampingan dengan harmonis sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jumlah tempat ibadah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV 4: Jumlah Masyarakat Berdasarkan Sarana Ibadah DiKelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

NO	Rumah Ibadah	Jumlah (Unit)
1	Mesjid	4
2	Musholla/Surau	8
3	Gereja	5
	Jumlah	17

Sumber: Data Kelurahan Ukui, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan beragama islam. Ini dapat dilihat dari jumlah mayarakat yang menganut agama islam yang ada di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Sedangkan yang memeluk agama lain biasanya sedikit saja. Berdasarkan data dan informasi dilapangan maka di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tidaklah bertentangan dengan agama islam yang merupakan mayoritas masyarakat di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab V ini penulis akan menjelaskan atau menggambarkan hasil dari Penelitian yang telah dilakukan mengenai *Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga* , dengan cara pengumpulan data dengan penyebaran angket dan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dengan turun langsung kelapangan. Namun sebelum memasuki hasil dari penelitian penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas dari responden yang penulis anggap merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian. Adapun identitas responden yang ingin penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Identitas responden berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting didalam mempengaruhi pekerjaan dan diyakini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap suatu permasalahan dan juga akan mempengaruhi terhadap cara berpikir dan tingkat wawasan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu penulis menilai sangat perlu memberikan penjelasan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan terakhir responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Lulusan SD	13	42%
2	Lulusan SLTP	8	26%
3	Lulusan SLTA	6	19%
4	Lulusan SI	4	13%
	Jumlah	31	100%

Sumber data: Olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan pendidikan adalah dari 31 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 13 orang atau 42%, berpendidikan SLTP 8 orang atau 26%, berpendidikan SLTA 6 orang atau 19% dan sebanyak 4 orang atau 13% berpendidikan Strata I. Berdasarkan responden paling banyak adalah pendidikan Lulusan SD sebanyak 13 orang atau sekitar 42% dan Lulusan paling sedikit adalah Pendidikan SI Sebanyak 4 orang atau 13%.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Tingkat Usia bertujuan melihat dari segi produktifitas kerja pada umur tersebut dapat dikatakan tergolong tinggi atau masa puncak karir seseorang. Untuk lebih jelaskan mengenai tingkat usia responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
----	------	--------	------------

1	2	3	4
1	20-30 tahun	9	30%
2	31-40 tahun	10	34%
3	41-50 tahun	7	23%
4	50 tahun keatas	5	13%
	Jumlah	31	100%

Sumber data: Olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan usia adalah dari 30 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 9 orang 30% berusia antara 20-30 tahun, sebanyak 10 orang atau 34% berusia 31-4 tahun, sebanyak 7 orang atau 23% berusia antara 41-50 tahun dan sebanyak 4 orang atau 13% berusia anantara 50 tahun keatas. Berdasarkan identitas responden berdasarkan usia yang paling banyak adalah 20-30 tahun sebanyak 10 orang atau 34% sedangkan usia yang paling sedikit sekitar 50 tahun keatas sebanyak 5 oang atau 13%.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi kearifan seseorang dalam melaksanakan tugas, kerana jenis kelamin dalam suatu organisasi sebagai pelaksana, sedangkan skiil atau kearifan merupakan factor seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan. Identitas jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	26	84%
2	Perempuan	5	16%
	Jumlah	31	100%

Sumber data: Olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin adalah dari 30 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 25 orang atau 84% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 5 orang atau 16% berjenis kelamin perempuan.

B. Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga

Pembinaan terhadap lembaga masyarakat adalah salah satu fungsi pemerintah khususnya Pemerintahan Kelurahan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan khususnya di Kelurahan Ukui RT/RW, PKK, Karang Taruna yang turut membantu tugas pemerintah kelurahan ukui. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga dapat dilihat dari beberapa indicator yang sudah penulis tetapkan yaitu :

1. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan Kegiatan yang dilakukan lurah dalam membekali anggota/perangkat kelembagaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktifitas kegiatan sesuai dengan rencana yang dimaksudkan penelitian disini adalah dimana pemerintah kelurahan Ukui mengadakan pertemuan, diskusi, dan musyawarah yang dibuat untuk membahas suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama.

Untuk mengetahui tanggapan dari responden mengenai penyuluhan yang dilakukan oleh lurah terhadap lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Ukui adalah sebagai berikut:

Tabel V.4 Tanggapan Dari Responden Mengenai Penyuluhan yang dilakukan Oleh Lurah Terhadap Anggota RT Di Kelurahan Ukui

No	Item Penilaian	Katagori Jawaban			Jumlah
		Berhasil	Cukup Berhasil	Kurang Berhasil	
1	Membuat Program Penyuluhan	14	8	8	30
2	Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah	14	13	3	30
3	Melakukan program yang telah diatur	10	8	12	30
4	Mengevaluasi program dari hasil tersebut	9	15	6	30
	Jumlah	47	44	29	120
	Rata-rata	12	11	7	30
	Persentase	40%	37%	23%	100%

Sumber data: Olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan dari pegawai kelurahan, anggota RT/RW, maupun Masyarakat mengenai pemberian penyuluhan yang diberikan oleh lurah ukui terhadap anggota RT dikelurahan ukui adalah dari 30 orang yang dijadikan responden sebanyak 12 orang atau 40% jawaban yang mereka berikan masuk katagori baik, yang mana dari data tersebut dapat diartikan bahwa anggota RT pernah mendapatkan penyuluhan, melakukan pertemuan dan diskusi dengan lurah, melakukan program yang telah diatur, serta lurah melakukan evaluasi terhadap program yang di berikan kepada RT tersebut, sementara sebanyak 11 orang atau 37% jawaban yang mereka berikan masuk katagori cukup baik, yang mana dari data tersebut diketahui bahwa anggota RT pernah mendapatkan penyuluhan, melakukan pertemuan dan diskusi dengan lurah, melakukan program yang telah diatur, serta lurah melakukan evaluasi terhadap program yang di berikan kepada RT akan tetapi lurah jarang atau kadang-kadang saja melakukan hal tersebut, selanjutnya 7 orang atau 23% dari jawaban para responden masuk katagori kurang baik, yakni maksudnya ialah mereka beranggapan lurah tidak pernah melakukan penyuluhan, melakukan pertemuan dan diskusi dengan anggota RT, melakukan program yang telah diatur, serta lurah juga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap program kegiatan para anggota RT.

Dan untuk hasil wawancara penulis dengan lurah ukui mengenai pemberian penyuluhan yang diberikan oleh lurah ukui kepada anggota RT adalah sebagai berikut:

“...Menurut saya, kami selaku pihak kelurahan memang harus dan sudah melakukan penyuluhan terhadap anggota RT dikelurahan ukui ini agar anggota RT

dapat memberdayakan masyarakat, terutama mengenai keamanan lingkungan dan masalah kebersihan dikelurahan ukui ini, dimana kami selaku pihak kelurahan sudah melakukan penyuluhannya kepada anggota RT untuk mengajak masyarakat untuk sadar akan masalah kebersihan lingkungan dan keamanan di kelurahan kita, dan walaupun kenyataannya anggota RT tersebut boleh dikatakan jarang mensosialisasikan intruksi dari kelurahan hal ini disebabkan oleh ketidak tahuan anggota RT karena setiap kelurahan melakukan pertemuan bulanan banyak anggota RT tersebut yang tidak hadir pada pertemuan tersebut ataupun mungkin ada factor lain yang menyebabkan para anggota RT ini tidak sempat memberikan sosialisasi kepada warganya”.

Dan untuk hasil wawancara penulis dengan Pegawai Kelurahan (sekertaris lurah) ukui mengenai pemberian penyuluhan yang diberikan oleh lurah ukui kepada anggota RT adalah sebagai berikut:

“...Menurut saya, kami selaku pihak kelurahan telah ada melakukan penyuluhan kepada anggota RT baik itu dengan mengadakan penyuluhan kepada anggota RT, dan juga kami pihak kelurahan dalam melakukan pertemuan bulanan juga selalu melakukan sesi Tanya jawab dengan para anggota RT, dan untuk evaluasi kami memang ada melakukan evaluasi kinerja RT walaupun tidak sering atau hanya sekali-sekali”.

Hasil wawancara penulis dengan Pegawai Kelurahan (bidang humas) ukui mengenai pemberian penyuluhan yang diberikan oleh lurah ukui kepada anggota RT adalah sebagai berikut:

“...Menurut saya, kami selaku kelurahan sudah melakukan penyuluhan terhadap anggota RT dikelurahan ukui ini dimana anggota RT melakukan pertemuan dan diskusi dengan lurah agar program yang telah diatur dapat berjalan dengan baik walaupun tidak semua peserta yang hadir karena anggota RT mayoritas petani dan ada kesibukan masing-masing,serta lurah memang ada melakukan evaluasi terhadap program yang di berikan kepada RT agar kami pihak kelurahan bisa mengetahui apakah program yang di buat terimplementasikan dengan baik atau tidak ”.

Sementara itu dari hasil observasi penulis dilapangan, memang benar lurah sudah memberikan pembinaan berupa penyuluhan ini kepada anggota RT dikelurahan ukui, seperti dengan lurah selalu satu kali setiap bulannya melakukan pertemuan dan diskusi dengan anggota lembaga kemasyarakatan dikelurah ukui yang mana dalam pertemuan ini lurah bersama lembaga kemasyarakatan dikelurahan ukui akan berdiskusi

dan membahas masalah-masalah yang ada dan juga untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dikelurahan ukui. Akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis dilapangan pada saat pertemuan ini khususnya para anggota RT ini kerap tidak hadir dipertemuan dikelurahan hal ini disebabkan karena kesibukan para RT yang mana mayoritas anggota RT dikelurahan ukui berprofesi sebagai petani, jadi pada saat lurah mengadakan pertemuan lebih dari sebagian anggota RT ini mereka sibuk bekerja di ladang mereka masing-masing.

Dari data dan informasi yang diperoleh penulis dari para responden diatas baik itu melalui kuisioner, wawancara maupun observasi bahwasanya pemberian pembinaan kepada anggota RT berupa penyuluhan berdasarkan presentase terbesar sudah cukup baik dengan presentase sebesar 40% dari keseluruhan presentase yang penulis dapatkan dari para responden yang ada

2. Pengarahan

Menurut G.R Terry pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau berkerjasama dan bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapaitujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha oganisasi.

Pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan lurah untuk memberi arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk mengetahui tanggapan dari responden mengenai pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Lurah terhadap lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Ukui adalah sebagai berikut:

Tabel V.5 Tanggapan Dari Responden Mengenai Pengarahan Dilakukan Oleh Lurah Terhadap Anggota RT Di Kelurahan Ukui

No	Item Penilaian	Katagori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan	15	8	7	30
2	Mengumpulkan setiap penyelenggaraan pemerintahan desa	17	10	3	30
	Jumlah	32	18	10	60
	Rata-rata	16	9	5	30
	Persentase	53%	30%	17%	100%

Sumber data: Olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.5 diketahui berdasarkan tanggapan dari para responden mengenai pemberian pengarahan yang dilakukan lurah terhadap anggota RT dikelurahan ukui dari 30 orang yang dijadikan responden sebanyak 16 orang atau 53% jawaban yang mereka berikan masuk katagori baik, yang mana dari data diatas dapat diartikan bahwa anggota RT mendapatkan pengarahan dari lurah berupa pengarahan

yang berhubungan tentang pemerintahan dan juga dalam memberikan pengarahan lurah mengumpulkan para penyelenggara pemerintahan khususnya para anggota RT, sedangkan sebanyak 9 orang atau 30% menyatakan

cukup baik, yakni maksudnya lurah jarang melakukan pengarah kepada anggota RT yang berhubungan dengan pemerintah dan lurah juga jarang mengumpulkan penyelenggara pemerintahan desa dikelurahan ukui untuk memberikan pengarahan berhubungan dengan pemerintahan, dan sebanyak 5 orang atau 17% menyatakan kurang baik, maksudnya ialah bahwa lurah tidak pernah memberikan pengarahan kepada anggota RT mengenai pemerintahan dan juga lurah tidak pernah mengemukakan para penyelenggara pemerintahan di kelurahan ukui untuk memberikan arahan mengenai pemerintahan.

Dan untuk hasil wawancara penulis dengan lurah ukui mengenai pemberian pengarahan kepada anggota RT adalah sebagai berikut:

“...mengenai pemberian pengarahan, saya sebagai lurah di kelurahan ukui sudah memberikan arahan kepada anggota RT mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dikelurahan ukui ini. Yang mana sebagai mana kita lihat bersama memang akhir-akhir ini biasa dikatakan tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan. Hal ini disebabkan karena ketidak ketersediaan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dikelurahan ukui ini. Sebagai contohnya saja masalah kebersihan tadi kami pihak kelurahan tidak mempunyai pendanaan yang cukup untuk membeli atau mengadakan barang-barang penunjang misalnya;ketidak ketersediaan tong sampah, peralatan-peralatan kebersihan dan lain-lain, hal ini dikareanakan kelurahan tidak sama dengan desa yang bisa membuat perdes atau peraturan desa yang mewajibkan anggota masyarakat untuk iuran dalam mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan bakti sosial di daerahnya”.

Dan untuk hasil wawancara penulis dengan Pegawai Kelurahan (sekertaris lurah) ukui mengenai pemberian pengarahan kepada anggota RT adalah sebagai berikut:

“...mengenai pemberian pengarahan, kami sebagai pegawai kelurahan di kelurahan ukui sudah memberikan arahan kepada anggota RT pemberian arahan ini biasanya kami dari pihak kelurahan memberikannya pada saat rapat bulanan yang dilakukan oleh kelurahan, walaupun pada saat pertemuannya tidak semua anggota RT yang dapat hadir dikarenakan kesibukan masing-masing”.

Dan untuk hasil wawancara penulis dengan Pegawai Kelurahan (bidang humas) ukui mengenai pemberian pengarahan kepada anggota RT adalah sebagai berikut:

“...mengenai pemberian pengarahan, kami sebagai pegawai kelurahan di kelurahan ukui sudah memberikan arahan kepada anggota RT mengenai tugas apa saja yang harus dilakukan oleh pihak RT untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan seperti yang saya katakan tadi pada tiap pertemuan memang kami pihak kelurahan tidak bisa menghadirkan semua anggota RT untuk diberi pengarahan karena kesibukan masing-masing.”

Dan dari observasi yang penulis lakukan di lapangan memang benar lurah sudah melakukan pembinaan berupa pengarahan kepada para anggota RT di kelurahan ukui mengenai kegiatan-kegiatan sosial, walaupun yang penulis lihat dilapangan kegiatan-kegiatan tersebut kebanyakan hanyalah berupa wacana saja dan belum terrealisasikan pada kegiatan yang nyata di masyarakat, yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan lurah tersebut di dapati oleh penulis alasan mengapa kelurahan kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di kelurahan di karenakan ketidak tersedianan dana di kelurahan untuk merealisasikan kegiatan yang sudah dibuat bersama.

Dari data dan informasi yang penulis dapatkan dari para responden diatas baik itu melalui kuisisioner,wawancara, maupun observasi maka berdasarkan presentase terbesar maka dapat dikatakan bahwa pemberian pembinaan berupa pengarahan sudah dikatagorikan cukup baik dengan presentase sebesar 53% dari keseluruhan presentase yang penulis dapatkan dari para responden yang ada.

3. Bimbingan

Menurut Yee (1997), bimbingan adalah bantuan berkesinambungan dan bersifat mendidik yang diberikan kepada individu agar mampu membuat penyesuaian dan perubahan tingkah laku yang perlu.

Bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan merupakan usaha-usaha yang dilakukan Lurah untuk mengajak, mengiring serta mendorong agar Lembaga Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk mengetahui tanggapan dari responden mengenai pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Lurah terhadap lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Ukui adalah sebagai berikut:

Tabel V.6 Tanggapan Dari Responden Mengenai Bimbingan Yang Dilakukan Oleh Lurah Terhadap Anggota RT Di Kelurahan Ukui

No	Item Penilaian	Katagori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT diberikan secara tertulis	8	8	14	30
1	2	3	4	5	6

2	Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut	7	13	10	30
3	Adanya diskusi atau Tanya jawab antarpembimbing dan yang dibimbing	10	8	12	30
	Jumlah	25	29	36	90
	Rata-rata	8	10	12	30
	Persentase	27%	33%	40%	100%

Sumber data: Olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.6 diatas diketahui tanggapan dari para responden mengenai pemberian bimbingan oleh lurah kepada anggota RT dari 30 orang yang dijadikan responden sebanyak 8 orang atau 27% jawaban yang mereka berikan masuk katagori baik,yang mana maksudnya ialah bahwa anggota RT mendapatkan bimbingan dari lurah baik itu dengan diakannya pertemuan ataupun dengan diadakannya diskusi antara lurah dengan anggota RT, sedangkan sebanyak 10 orang atau 33% jawaban dari responden masuk katagori cukup baik,

maksudnya ialah anggot RT memang mendapatkan bimbingan dari lurah akan tetapi sangat jarang dilakukan dan hanya dilakukan sesekali saja, selanjutnya untuk 12 orang atau 40% responden jawaban mereka masuk katagori kurang baik, yakni maksudnya ialah bahwa lurah tidak pernah memberikan bimbigan kepada anggota RT baik itu

berupa pertemuan ataupun dengan melakukan diskusi bersama antara anggota RT dengan pihak kelurahan.

Dan untuk hasil wawancara penulis dengan lurah ukui mengenai pemberian bimbingan kepada anggota RT adalah sebagai berikut:

“...Mengenai pemberian bimbingan kepada para RT ini sebenarnya sudah saya lakukan, walaupun bimbingan ini hanya dalam bentuk pertemuan bulanan saja, tetapi pada setiap pertemuan kami pihak kelurahan selalu berdiskusi bersama dengan anggota RT maupun lembaga masyarakat lainnya mengenai situasi daerahnya masing-masing, dimana pihak kelurahan berencana kembali menghidupkan kembali siskamling kita, yang walaupun kenyataannya dilapangan sangat sulit sekali mengajak masyarakat itu untuk sadar akan keamanan lingkungan besama, dan pada setiap pertemuan selanjutnya saya berencana untuk memberikan bimbingan bagaimana caranya agar anggota RT ini bisa mengajak masyarakat untuk sama-sama mau menjaga lingkungan sekitar walaupun saya akui tidak semua anggota RT ini bisa hadir saat pertemuan kaena kesibukannya masing-masing.”

Dan untuk hasil wawancara penulis dengan Pegawai Kelurahan(sekretaris lurah) ukui mengenai pemberian bimbingan kepada anggota RT adalah sebagai berikut:

“...Mengenai pemberian bimbingan kepada para anggota RT ini kami pihak kelurahan sudah memberikan bimbingan kepada anggota RT sebagai contohnya masalah keamanan dan kebersihan lingkungan kita, yang mana pada saat pertemuan bulanan yang dilakukan dikelurahan ini kami selalu mengadakananya jawab masalah kebersihan dan keamanan di lingkungan kelurahan kita”.

Dan untuk hasil wawancara penulis dengan Pegawai Kelurahan(bidang humas) ukui mengenai pemberian bimbingan kepada anggota RT adalah sebagai berikut:

“...Mengenai pemberian bimbingan kepada para anggota RT ini sebenarnya sudah di lakukan, sepeti yang saya katakana tadi kami pada saat pertemuan akan membahas masalah-masalah yang ada dikelurahan terutama yang jadi focus kami sekarang dari pihak kelurahan adalah masalah keamanan dan kebersihan lingkungan yang mana kami pihak kelurahan akan berupaya terus untuk mengetahui apa masalah yang ada dilapangan dan untuk itu memang kami pihak kelurahan dalam pertemuan dengan para anggota RT Selalu mengadakan sesi Tanya jawab dengan mereka karena anggota RT ini memang paling dekat dengan masyarakat”.

Dan dari hasil observasi penulis dilapangan penulis menemukan memang lurah sudah memberikan bimbingan kepada para anggota RT akan tetapi karena ketidakaktifan para anggota RT ini dimasyarakat menjadikan masyarakat merasa bahwa dari pihak kelurahan belum optimal dalam pemberian bimbingan kepada para anggota RT dikelurahan ukui, hal ini bisa penulis lihat dari tidak aktifnya siskambling di kelurahan ukui padahal dari pihak kelurahan sudah berupaya mengintruksikan kepada para anggota RT dan RW untuk mengaktifkan lagi siskambling akan tetapi sampai sekarang siskambling dikelurahan ukui masih belum berjalan.

Dari data dan informasi yang penulis dapatkan dari para responden diatas baik itu melalui kuisisioner,wawancara, maupun observasi maka berdasarkan presentase terbesar maka dapat dikatakan bahwa pemberian pembinaan berupa bimbingan masuk katagori cukup baik dengan melihat presentase terbesar yakni 40% dari semua data yang penulis dapatkan dari para responden yang ada.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Sudy Rukun Tetangga adalah sebagai berikut:

Tabel V.7 Rekapitulasi Tanggapan Dari Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga

No	Item Penilaian	Katagori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

1	Memberikan Penuluhan	12	11	7	30
2	Memberikan Pengarahan	16	9	5	30
3	Memberikan Bimbingan	8	10	12	30
	Jumlah	36	30	24	90
	Rata-rata	12	10	8	30
	Persentase	40%	33%	27%	100%

Sumber data: Olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat diketahui tanggapan dari responden mengenai Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga adalah dari 30 orang yang dijadikan responden sebanyak 12 orang atau 40% menyatakan baik,yakni maksudnya lurah ukui telah berhasil melakukan pembinaan terhadap anggota RT di kelurahan ukui, sedangkan sebanyak 10 orang atau 33% menyatakan cukup baik, maksudnya lurah ukui memang ada melakukan pembinaan kepada anggota RT tetapi tidak sering hanya sesekali saja lurah ukui melakukan pembinnaan kepada anggota RT, dan untuk 8 orang atau 27% menyatakan kurang baik, maksudnya yakni lurah ukui sama sekali tidak pernah melakukan pembinaan kepada para anggota RT di kelurahan ukui, sehingga anggota RT tidak aktif dikarenakan tidak adanya pembinaan dari kelurahan.

Dari hasil rekapitulasi yang ada diatas bahwasanya Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga dapat dikategorikan Cukup Baik dengan hasil rekapitulasi responden sebanyak 40%.

C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Melakukan Pembinaan Terhadap Anggota Rt Dikelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai factor penghambat dalam pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap anggota RT di kelurahan ukui kecamatan ukui kabupaten pelalawan adalah:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang professional, dalam hal ini adalah para anggota RT yang mana dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan lurah ukui dan juga pegawai kelurahan ukui penulis dapat simpulkan bahwa dalam melakukan tugas yang sudah diberikan lurah ukui kepada para anggota RT masih banyak RT dikelurahan ukui yang masih tidak mensosialisasikan intruksi lurah yang diberikan untuk masyarakat ukui yang mana ini terjadi dikarenakan masih banyaknya anggota RT yang tidak menghadiri rapat yang diadakan oleh pihak kelurahan yang didalam rapat tersebut berisi intruksi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dikelurahan ukui dan harus disampaikan oleh anggota RT kepada masyarakat. Dan dari observasi yang penulis lakukan

dilapangan penulis menyimpulkan bahwa kurang profesioalnya para anggota RT ini dalam melakukan tugasnya diakibatkan kurang pahamiya dan juga kurang aktifnya para anggota RT dikelurahan ukui dalam menjalankan tugasnya, hal ini juga diakibatkan yang mana mayoritas anggota RT yang sekarang dikelurahan ukui diisi oleh orang-orang yang masih pada tingkat pendidikan yang rendah sehingga dalam melakukan sosialisasi yang diberikan pihak kelurahan untuk masyarakat masih kurang baik, dan juga penulis menemukan dalam melakukan intruksi yang diberikan pihak kelurahan untuk disampaikan kepada masyarakat para anggota RT ini terkesan lambat dalam melakukan kewajibannya yakni menyampaikan intruksi yang diberikan pihak kelurahan untuk disampaikan kepada masyarakat.

2. Kurangnya dana yang ada dikelurahan ukui, yang mana dari hasil wawancara penulis dengan lurah ukui penulis menyimpulkan bahwa pihak kelurahan ukui masih kekurangan dana dalam melakukan kegiatan-kegiatan dikelurahan ukui dan menurut pendapat lurah ukui dari hasil wawancara penulis dengan lurah ukui ini terjadi dikarenakan tidak bisanya pihak kelurahan ukui dalam mencari dana lain untuk membantu kegiatan sosial dikelurah ukui hal ini disebabkan kelurahan yang memiliki batasan wewenang dalam mengumpulkan dana yang mana ini berbeda dengan desa dimana desa masih bisa melakukan kegiatan dengan mengeluarkan perdes untuk menarik iuran dimasyarakat untuk

kegiatan didesanya. Dan dari hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan penulis menemukan kebanyakan kegiatan yang sudah di sepakati dikelurahan hanya berupa wacana saja dan belum terealisasikan dengan baik seperti masalah keamanan dilingkuan dikelurahan ukui yang mana pada rapat bulanan yang dilakukan pada tanggal 09 juli 2019 dikelurahan ukui membahas tentang diadakannya kembali siskamling secara bergilir namun pada kenyataannya samapai pada saat ini penulis melihat masih tidak adanya siskamling dikelurahan ukui yang berjalan pada hal ini sudah dirapatkan dan sudah diintruksikan oleh lurah ukui supaya siskambling dikelurahan ukui ini berjalan kembali.

3. Juga dikarenakan mayoritas para anggota RT dikelurahan ukui ini yang diisi oleh orang-orang yang berprofesi sebagai petani yang hal ini mengakibatkan para anggota RT tidak bisa hadir disaat pihak kelurahan mengadakan pertemuan untuk memberikat arahan dan pembinaan kepada anggota RT dikarenakan para anggota RT ini sibuk bekerja dikebunya masing-masing.
4. Juga kurangnya rasa kerjasama antara masyarakat dengan pihak kelurahan dalam melakukan aktifitas-aktifitas sosial dikelurahan ukui yang disebabkan karena keberagamannya masyarakat yang berdomisili dikelurahan ukui sehingga sulit untuk diajak untuk melakukan kerjasama dalam menjaga lingkungan.

BAB VI

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dikelurahan ukui kecamatan ukui kabupaten pelalawan maka dapat disimpulkan:

1. Penyuluhan dari hasil kuisisioner, wawancara maupun observasi yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa lurah memang sudah ada dalam melakukan penyuluhan terhadap anggota RT dikelurahan ukui dengan diadakannya rapat bulanan yang mana dalam rapat tersebut lurah memang telah ada dalam melakukan penyuluhan akan tetapi dari hasil wawancara dan observasi penulis penyuluhan yang dilakukan oleh lurah tidak efektif dikarenakan masih sedikitnya para anggota RT yang hadir pada rapat tersebut (Lihat dokumentasi hal 99.).
2. Pengarahan dari hasil kuisisioner, wawancara maupun observasi yang penulis lakukan menyimpulkan bahwasanya lurah memang telah ada melakukan pengarahan kepada anggota RT akan tetapi lurah masih belum bisa mengumpulkan semua para penyelenggara pemerintahan desa terutama anggota RT dikarenakan kesibukan yang ada pada masing-masing anggota RT yang mana para anggota RT ini adalah mayoritas berprofesi sebagai petani .
3. Bimbingan dari hasil kuisisioner, wawancara maupun observasi yang penulis lakukan menyimpulkan bimbingan yang diberikan lurah masih hanya berupa rapat bulanan saja dan lurah juga kurang bisa mengadakan bimbingan dengan mengundang narasumber lain hal ini juga disebabkan karena kurangnya dana dikelurahan untuk mengundang

narasumber untuk memberikan bimbingan kepada anggota RT dan juga dalam memberikan bimbingan ini lurah masih belum bisa mengumpulkan para penyelenggara pemerintahan desa terutama para anggota RT.

B.Saran

1. Untuk pemerintah kelurahan khususnya kepada lurah untuk lebih digiatkan lagi pemberian pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan RT dikelurahan ukui kecamatan ukui kabupaten pelalawan dengan misalnya saja mengadakan banyak pertemuan tidak hanya pertemuan bulanan saja tetapi lebih sering untuk melakukan pembinaan kepada anggota RT supaya tercipta sumber daya yang profesional serta dapat memberdayakan masyarakat di kelurahan ukui.
2. Untuk pihak daerah, yakni pemerintah kabupaten pelalawan agar membantu pendanaan dalam penyelenggaraan berupa pelatihan kepada lembaga kemasyarakatan agar mereka dapat membuat kegiatan-kegiatan guna pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Bina Aksara: Yogyakarta
- Creswell, John W., (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Haninditas: Yogyakarta
- Husini Usman. (2006). *Pengantar Statistik*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Kansil CST dan Cristine, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Askara, Jakarta
- Manullang.M(200). *Dasar-dasar Manajemen, Cetakan Keduapuluh satu*. Yogyakarta, Penerbit. Gadjah Mada. University Press.
- Moekijat, 1998, *Pengembangan Organisasi*. PT. Rosda Karya, Bandung
- Nazie, Moh. 1999. *Metode Penelitian, Cetakan Ketiga*. Mandar Maju: Jakarta
- Ndraha, Talizihudu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Ndraha, Talizihudu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Talizihudu. 2015. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Nurcholis, 2005 Nurcholis, Hanif, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Garsindo, Jakarta.
- Nugroho, Rian D, 2008, *Public Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo
- Nugroho, Rian D, 2006, *kebijakan publik: Formulasi, Impelementasi, Eveluasi*. Jakarta, Elex Media Komputindo
- Rauf, Rahyunir, dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Zanafa Publishing: Pekanbaru
- Richard, Steers, 1985, *Efektifitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Rineka Cipta: Jakarta

- Santoso, 2004, *Menembus Otodoksi Kajian Kebijakan Publik*, Fisipol UGM,
Yogyakarta
- Santoso, 1995. *Pembinaan dalam Organisasi*. Jakarta: Gramediia Pustaka
- Siagin, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. CV Haji Masagung: Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada:
Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Good Government*, Mandar Maju, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekidjo Notoatmojo. 2003. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka
Pelajar: Yogyakarta
- Subarsono, AG. 2008. *Kebijakan publik, Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Pustaka
Pelajar: Yogyakarta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. CV. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta: Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama:
Bandung
- Thoha,Mifta.2011. *Perilaku Organisasi. Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Bandung
- Winarno, Richard Rose, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Rineka Cipta,
Jakarta

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Uraian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2005 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan

